

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan merupakan karya bersama yang berlangsung dalam sistem kehidupan insani tertentu. Menurut Webster's New World Dictionary seperti dikutip oleh Syaiful Sagala, pendidikan merupakan "proses pelatihan dan pengembangan pengetahuan, ketrampilan, pikiran, karakter, dan seterusnya, khususnya lewat persekolahan formal".¹ Pemahaman konsep mengenai pendidikan jika mengacu pada konsep tersebut menggambarkan bahwa pendidikan memiliki sifat dan sarannya yaitu manusia.

Dalam kaitannya dengan pendidikan, Tilaar mengemukakan seperti yang dikutip oleh Mulyasa, bahwa pendidikan nasional dewasa ini sedang dihadapkan pada empat krisis pokok, yakni yang berkaitan dengan relevansi atau efisiensi eksternal, mutu, elitisme, dan manajemen.²

Berbicara mengenai mutu merupakan salah satu hal yang masih menjadi momok pembahasan dalam dunia pendidikan. Dimana mutu pendidikan juga akan mempengaruhi kualitas lulusan itu sendiri. Apabila mutu pendidikannya bagus, maka hasil lulusan yang didapatkannya pun

¹ Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2013), 1.

² Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi; Konsep, Karakteristik, dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 4.

juga akan bagus, begitu juga sebaliknya apabila mutu pendidikan dalam suatu sekolah itu rendah maka itu juga akan berdampak pada lulusan yang dihasilkan oleh sekolah tersebut.

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan ini tidak bisa terlepas dari peran serta pemerintah dan segenap civitas pendidikan, baik kepala sekolah, tenaga kependidikan, proses pembelajaran, dan masyarakat.

Masyarakat merupakan input dari pengguna *stakeholder* pendidikan yang akan menikmati secara langsung hasil pendidikan itu sendiri.³ Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa konsep partisipasi dan pemberdayaan masyarakat adalah dengan keikutsertaan masyarakat dan manajemen sekolah melalui wadah dalam konteks menyeimbangkan tujuan pendidikan dengan lingkungan, yang merupakan komponen terpenting untuk menjalin hubungan yang interaktif dan positif dalam mensukseskan proses pembelajaran dan tujuan pendidikan yang diharapkan.

Oleh karenanya pemerintah dan kalangan swasta melakukan berbagai hal untuk tercapainya tujuan pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan. Antara lain melalui pengembangan kurikulum, sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya.⁴

Selain itu pemerintah juga sudah memberikan otonomi sekolah yang memberikan kebebasan sekolah untuk mengembangkan potensi

³ Ibid., 239.

⁴ Samad Usman, "Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah", *Jurnal Ilmiah Didaktika*, Vol.15 No.1 (Agustus, 2014), 15.

sesuai dengan kemampuan dan keadaan yang ada dalam lingkungan sekolah tersebut. Hal ini terangkum dalam MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). MBS diartikan sebagai penyelenggara kegiatan-kegiatan di sekolah dengan memaksimalkan semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana sekolah, dan semua masyarakat yang peduli terhadap pendidikan disekitar sekolah.⁵

Dalam Manajemen Berbasis Sekolah pada awalnya kita mengenal istilah BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan). Akan tetapi dengan diterbitkannya keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.044/2002 tanggal 2 April 2002 Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) dinyatakan tidak berlaku. Dan sebagai gantinya pada tingkat satuan pendidikan ini dibentuk badan yang diberi nama komite sekolah.

Komite sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Untuk penamaan badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing satuan pendidikan, seperti komite sekolah, majelis madrasah, majelis sekolah, komite TK, atau nama-nama lain yang disepakati bersama.⁶

⁵ Ikbal Barlian, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Jakarta: Erlangga, 2013), 7.

⁶ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 89.

Pembentukan komite sekolah pada setiap jenjang pendidikan ini dimaksudkan agar terdapat suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Adapun tujuan dari dibentuknya komite sekolah yaitu 1). Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan; 2). Meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan 3). Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan yang bermutu di satuan pendidikan.⁷

Menurut UUSPN No.20 tahun 2003 Pasal 56 Ayat 3 komite sekolah adalah sebagai lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arah dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yaitu sekolah/madrasah.⁸

Menurut Syaiful Sagala peran serta masyarakat melalui wadah komite sekolah memiliki posisi yang amat strategis dalam mengembangkan tanggung jawab masyarakat untuk kemajuan pendidikan.⁹ Aspek penting dari peran serta masyarakat melalui wadah komite sekolah ini berkaitan dengan membangun sikap sadar mutu

⁷ Ibid., 90.

⁸ Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, 240.

⁹ Ibid., 245.

pendidikan pada masyarakat dan mengetahui arti dari pentingnya keberadaan sekolah bagi anak-anaknya.

Namun persoalan yang berkembang di lapangan selama ini, kehadiran komite sekolah hanyalah sebagai formalitas semata, dan pihak orang tua atau wali murid juga tidak mengetahui secara mendalam fungsi dan peran komite sekolah di setiap satuan pendidikan.¹⁰ Tidak sedikit juga yang beranggapan bahwa komite sekolah memiliki peran yang sama dengan BP3 di masa lampau, yaitu badan yang bertugas sebagai pengumpul dana bantuan dari wali murid untuk kepentingan pendidikan bagi anak-anaknya. Namun lebih dari itu sebenarnya komite sekolah memiliki peran yang lebih dari sekedar hal tersebut.

Berdasarkan keputusan Mendiknas No.044/U/2002 lampiran II tentang dewan pendidikan dan komite sekolah disebutkan keberadaan komite sekolah berperan dalam hal sebagai berikut:¹¹

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Pendukung (*suppoting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

¹⁰ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, 95.

¹¹ Kepmendiknas, SK No.044/U/2002

4. Mediator antara pemerintah (*executive*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Berdasarkan keputusan Mendiknas diatas jelaslah bahwa kehadiran komite sekolah tidak hanya sebagai pengumpul dana dari orang tua siswa semata, namun lebih jauh komite sekolah harus dapat menjadi sebuah organisasi yang benar-benar dapat memberikan pertimbangan, memberikan dukungan, pengontrol dan mediator pada satuan pendidikan.

Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Nganjuk yang bertempat di Kecamatan Tanjunganom ini merupakan salah satu sekolah yang menjadi favorit di wilayah Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Hal ini terbukti dari pemenuhan kursi pada saat penerimaan siswa baru disetiap ajaran barunya selalu penuh. Selain itu di MTsN 2 Nganjuk komite sekolahnya juga sudah terbentuk seiring dengan keputusan Mendiknas dan beberapa kali penulis melihat komite sekolah juga sering melakukan pertemuan dengan wali murid.

Berdasarkan pada uraian diatas maka penulis tertarik membahas masalah yang berjudul “Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTs Negeri 2 Nganjuk”, ditinjau dari empat peran komite sekolah yang tercantum dalam kepmendiknas No.044/U/2002 tentang komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis memfokuskan penelitian pada hal berikut:

1. Bagaimana peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Negeri 2 Nganjuk?
2. Bagaimana peran komite sekolah sebagai pendukung (*supporting agency*) dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Negeri 2 Nganjuk?
3. Bagaimana peran komite sekolah sebagai pengontrol (*controlling agency*) dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Negeri 2 Nganjuk?
4. Bagaimana peran komite sekolah sebagai mediator dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Negeri 2 Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah mengetahui peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Dengan sub tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam meningkatkan mutu pendidikan disekolah.
2. Untuk mengetahui peran komite sekolah sebagai pendukung dalam meningkatkan mutu pendidikan disekolah.

3. Untuk mengetahui peran komite sekolah sebagai pengontrol dalam meningkatkan mutu pendidikan disekolah.
4. Untuk mengetahui peran komite sekolah sebagai mediator dalam meningkatkan mutu pendidikan disekolah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.
2. Secara Praktis
 - a. Peneliti mendapatkan pengalaman didalam mengkaji peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.
 - b. Diharapkan dapat dijadikan masukan dan bahan kajian bagi semua pihak terutama bagi pihak sekolah itu sendiri dan juga bagi komite sekolahnya.
3. Secara institusional, dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran atau sebagai bahan masukan untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan mutu pendidikan melalui peranan komite sekolah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian terhadap penemuan terdahulu yang bersumber dari berbagai sumber buku, skripsi, thesis atau sumber lain yang relevan terhadap penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun kajian pustaka yang berkaitan dengan Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Nurshalekha, mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2017, dalam skripsinya yang berjudul peran komite sekolah dalam pelaksanaan program pembelajaran al-Qur'an di SDIK Nurul Qur'an Aceh Besar, diantaranya yaitu:

1. Peran komite sekolah yaitu sebagai penyeimbang antara keberadaan kebijakan sekolah dan yang bisa menyelaraskan apa yang menjadi keinginan dari wali murid.
2. Upaya komite sekolah dalam mengontrol program pembelajaran al-Qur'an yaitu melakukan seleksi terhadap guru al-Qur'an, membuat evaluasi terhadap guru al-Qur'an, melihat kapasitas kemampuan guru.
3. Hambatan-hambatan yang dialami komite sekolah pada saat mengontrol program pembelajaran yaitu kurangnya dukungan orang tua murid ketika berada di rumah.

Riza Wicaksono, mahasiswa fakultas ilmu pendidikan Universitas Negeri Malang tahun 2009 dengan skripsinya yang berjudul peran komite

sekolah dalam peningkatan mutu pembelajaran (studi kasus di SMPN 9 Malang) menyimpulkan bahwa:

1. Bentuk organisasi komite sekolah SMPN 9 Malang berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Kepmendiknas) Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan komite sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah atas kesepakatan pihak komite sekolah dan sekolah. kebutuhan sekolah dituangkan dalam program kerja komite sekolah dan sekolah. komite sekolah terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan anggota yang berjumlah 9 orang.
2. Strategi komite sekolah dalam menggalang dana untuk peningkatan mutu pembelajaran salah satunya dari orang tua siswa yang dinamakan dengan dana Peran Serta Masyarakat (PSM) ada dua macam yaitu sumbangan pembangunan dan sumbangan sukarela. Sebelum komite sekolah menarik sumbangan pembangunan komite sekolah harus mengetahui program sekolah berupa program jangka panjang (8 tahun), program jangka menengah (4 tahun), dan program jangka pendek (1 tahun) dan memprioritaskan program sekolah yang harus didahulukan. Sehingga komite sekolah dapat mengetahui jumlah dana yang diperlukan, langkah selanjutnya yaitu menarik sumbangan kepada wali murid dengan memberikan surat edaran kepada wali murid yang bertujuan untuk meminta sumbangan pembangunan. Batas maksimal pembayaran sumbangan pembangunan tersebut tiga bulan.

Apabila ada siswa yang belum membayar sampai batas maksimal maka diberi kelonggaran sampai akhir semester. Untuk siswa yang orang tuanya tidak mampu oleh sekolah dibebaskan dari penarikan sumbangan.

3. Faktor pendukung bagi komite sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran meliputi faktor manusia: masyarakat, guru, pegawai tata usaha dan faktor non manusia: sarana dan prasarana.
4. Faktor penghambat bagi komite sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran yaitu wali murid yang kurang perhatian terhadap program komite sekolah dan lingkungan sekolah yang sempit.

Sawaludin, mahasiswa Administrasi Publik program pasca sarjana Universitas Terbuka Jakarta tahun 2012 dengan tesisnya yang berjudul analisis manajemen komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di SMKN Tanjung Lombok Utara menyimpulkan bahwa manajemen komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di SMKN 1 Tanjung dari lima dimensi (*Tangibel*/berwujud, *Reability*/keandalan, *Responseveness*/keresponsifan, *Assurance*/jaminan, *Empathy*/empati) belum maksimal dalam memberikan layanan prima atau layanan terbaik.

Dari sini penulis ingin melakukan penelitian yang senada dengan penelitian yang terdahulu yakni “Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Nganjuk”. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang terdahulu,

karena penelitian ini berfokus pada peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dimana mutu pendidikan disini berfokus pada mutu fisik pendidikan, dan tempat penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk pada tingkat MTsN, sedangkan penelitian yang sudah dilakukan diatas pada umumnya berfokus pada peningkatan pembelajaran dan juga kualitas pelayanan dalam pendidikan.